

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan. Air juga dipergunakan untuk beberapa kepentingan diantaranya untuk minum, masak, mencuci, dan segala aktifitas lain yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan air bersih. Air bersih yang tersedia di alam semakin buruk kondisinya sehingga air menjadi tidak tersedia dengan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang mahal karena pengelolaan untuk mendapatkan air yang baik secara kuantitatif dan kualitatif memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Berbagai macam aktivitas yang dilakukan di suatu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) akan dapat mempengaruhi aliran air di bagian hilir baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alih fungsi lahan di daerah hulu dapat menyebabkan peningkatan erosi sehingga sedimen yang terbawa oleh aliran air semakin meningkat. Di samping itu, debit air yang cukup besar dari daerah hulu tidak dapat tertampung maksimal oleh badan air karena adanya sedimen sehingga mengakibatkan banjir di daerah tengah maupun hilir. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan aktivitas pertanian, industri, dan rumah tangga. Akibatnya, kualitas air menurun karena pembuangan limbah yang semakin meningkat ke badan air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami (Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki fungsi hidrologis yang berkaitan dengan penyediaan air, sebagai daerah tangkapan hujan, dan mengalirkannya ke *outlet*. Di seluruh Indonesia kurang lebih terdapat 5.590 Daerah Aliran Sungai (DAS) (Kodoatie dan Rustam, 2010). Sejumlah $\pm 70\%$ air merupakan aliran permukaan (*surface runoff*) yang masuk kesungai-sungai dan sebagian terbang ke laut (Kodoatie, 2001). Dengan demikian, potensi kuantitas air di Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat besar jika dibandingkan air tanah. Selain itu, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu ekosistem di mana Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai tempat tinggal dan berlangsungnya aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia. Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat mendukung usaha dalam bidang pertanian, industri, maupun kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan manusia berperan penting dalam kelangsungan dan kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini juga berlaku pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Code yang ada di Kota Yogyakarta DIY. Secara geografis, kedudukan Sungai Code dirasakan sangat penting di daerah Kotamadya Yogyakarta karena sungai ini disamping melewati pusat kota juga melewati pusat-pusat aktivitas yang sangat penting seperti Kraton Yogyakarta, kawasan wisata dan perdagangan Malioboro, pusat perdagangan Beringharjo, Kantor DPRD Tingkat I DIY, Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I

DIY, Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Hotel Garuda, Hotel Melia Purosani, dan masih banyak fasilitas kota lainnya yang dilewati Sungai Code. Wilayah permukiman sepanjang Sungai Code yang terletak di pusat kota ini selalu menarik perhatian masyarakat untuk bertempat tinggal, hingga saat ini kepadatan penduduk dan bangunan sangat padat. Pertimbangan mereka dalam memilih lokasi bagi permukiman lebih mengutamakan kedekatan dengan lokasi tempat usaha atau mata pencahariannya dari pada bahaya banjir, legalitas, dan kekumuhan lingkungan, sehingga Daerah Aliran Sungai (DAS) kawasan bantaran Sungai Code secara periodik pada saat musim penghujan selalu terjadi banjir.

Pada bulan April 2015 terjadi banjir di bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta. Ketinggian banjir di sejumlah titik di Kota Yogyakarta mencapai antar 1 hingga 3 meter. Luapan Sungai Code juga mengakibatkan permukiman di Kota Yogyakarta terendam banjir, di antaranya kawasan Papringan, Danurejan, dan Bintaran. (liputan6, 2015).

Pada bulan April 2016, tebing Sungai Code yang berada di RT 29 RW 7 Kampung Jogoyudan Gowongan Jetis Kota Yogyakarta longsor. Akibatnya, satu rumah kehilangan ruangan dan 4 rumah di sekitarnya retak. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur Kota Yogyakarta beberapa hari sebelumnya. Tebing Sungai Code yang longsor memiliki panjang sekitar 3 meter, tinggi 10 meter dengan sudut kecuraman hampir tegak lurus. Namun, talud di sisi selatan tebing yang longsor juga retak sehingga mengancam 4 rumah di atasnya. (liputan6, 2016)

Sebanyak dua kampung di Danurejan yakni Cokroyudan, Tegalpanggung dan Gemblakaan Bawah Suryaatmajan ikut merasakan dampak hujan deras. Di Sorosutan, Umbulharjo, akibat luapan Sungai Code sekitar 200 warga RT 62/RW16 diungsikan setelah kawasan di sekitar Green House terendam air setinggi kurang lebih satu meter. Luapan terjadi setelah tanggul sisi timur Sungai Code jebol sekitar 20 meter. Pada bulan April 2016, tebing Sungai Code yang berada di RT 29 RW 7 Kampung Jogoyudan, Gowongan, Jetis Kota Yogyakarta longsor. Akibatnya, satu rumah kehilangan ruangan dan 4 rumah di sekitarnya retak. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur Kota Yogyakarta beberapa hari sebelumnya. Tebing Sungai Code yang longsor memiliki panjang sekitar 3 meter, tinggi 10 meter dengan sudut kecuraman hampir tegak lurus. Namun, talud di sisi selatan tebing yang longsor juga retak sehingga mengancam 4 rumah di atasnya. (liputan6, 2016).

Bencana banjir diatas, mendorong dibutuhkanya tindakan mitigasi yang efektif untuk mengelola potensi risiko terutama apabila perubahan tersebut menimbulkan guncangan terhadap seluruh sektor pembangunan, yang dimaksud mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kerugian yang diakibatkan bencana banjir sangat besar maka penanggulangan bencana banjir diharapkan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin.

Mitigasi banjir secara komprehensif dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus didukung semua elemen masyarakat. Supaya mitigasi dapat berjalan dengan baik, upaya pengendalian banjir tidak bisa hanya difokuskan pada penanganan fisik saja, namun harus disinergikan juga dengan pembangunan non-fisik yang menyediakan ruang lebih luas bagi peran serta masyarakat, sehingga tercapai suatu sistem pengendalian banjir yang lebih optimal. Untuk melakukan tindakan mitigasi bencana yang berkelanjutan, maka perlunya peran serta dari masyarakat dan pemerintah dalam melakukan tindakan mitigasi.

Saptutyingsih (2007) dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Willingness To Pay Untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Code Di Kota Yogyakarta”. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Gender dan keberadaan anak di dalam rumah tangga berpengaruh terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta (2) Pendapatan berpengaruh terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta. Apabila pendapatan meningkat sebesar 1 rupiah maka *willingness to pay* akan naik sebesar 0,0005 rupiah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi keinginan untuk memperbaiki kesehatan melalui perbaikan kualitas lingkungan khususnya kualitas air Sungai Code. (3) Ada atau tidaknya aktifitas mempunyai pengaruh terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta. (4) Lama tinggal dan level kualitas air sungai Code tidak berpengaruh terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air sungai Code

di Kota Yogyakarta. Rusminah dan Gravitiani (2012) melakukan penelitian dengan judul Kesediaan Membayar Mitigasi Banjir dengan Pendekatan *Contingent Valuation Method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan, usia, pendidikan dan jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan untuk membayar, melakukan tindakan mitigasi bencana banjir, dan angka kesediaan untuk membayar (WTP) rata-rata petani/ responden hanya antara Rp.250.000-Rp.500.000 untuk mitigasi banjir.

Peran serta masyarakat yang dalam mitigasi banjir di Kota Yogyakarta adalah upaya sadar (kesediaan) seluruh komponen terkait untuk mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana mestinya dengan biaya dari masyarakat sendiri. Hal ini disebut dengan *Willingness To Pay* (WTP) atau kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai analisis *Willingness to pay* mitigasi banjir perlu dilakukan.

B. Perumusan Masalah

1. Berapa besar nilai WTP masyarakat untuk mitigasi resiko banjir?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi WTP masyarakat di perumahan yang terendam banjir?

C. Tujuan

1. Menganalisis besar nilai WTP masyarakat untuk mitigasi resiko banjir.
2. Menganalisis faktor-faktor pendapatan, usia, lama tinggal, kepemilikan rumah untuk mitigasi banjir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat berguna untuk pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Dengan mengetahui penanganan dan mitigasi banjir, maka bisa dilakukan evaluasi hal-hal apa yang kurang dan perlu ditingkatkan supaya kegiatan mitigasi banjir akan lebih terfokus, sehingga hasilnya akan maksimal. Peran serta masyarakat bisa dioptimalkan dengan mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam mitigasi bencana, dan pada akhirnya dapat memberi kontribusi pada mitigasi bencana banjir dengan memberikan saran tentang penanganan banjir yang melibatkan peran serta aktif masyarakat secara berkelanjutan.